

**LAPORAN KINERJA (LKj) BADAN
PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

TAHUN ANGGARAN 2025



**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKj ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi lain penyusunan LKj ini juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2023–2026. Dalam penyusunan LKj ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga penyajian LKj Badan Penghubung Pemerintah Aceh ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2026
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH ACEH

SAID MARZUKI, S.IP., M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19870925 200701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

RINGKASAN EKSEKUTIFiii

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang 1

 B. Data Umum Organisasi 1

 C. Struktur Organisasi2

 D. Sistematika Penyajian4

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....6

 A. Rencana Strategis tahun 2023-2026.....6

 B. Indikator Kinerja Utama.....6

 C. Penetapan Kinerja tahun 20257

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 A. Capaian Kinerja9

 B. Realisasi Anggaran11

BAB IV PENUTUPAN15

 A. Kesimpulan15

 B. Saran15

LAMPIRAN I16

LAMPIRAN II17

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja tahun 2025 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2025 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Capaian Kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Penghubung Pemerintah Aceh untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Dalam kaitan tersebut Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari 1 sasaran strategis yang telah dilaksanakan dengan baik. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 1 indikator kinerja utama. Capaian Kinerja Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh untuk tahun 2025 adalah 100%, sedangkan laporan realisasi keuangan sebesar 98,64%.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan beberapa program kegiatan yaitu program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah, dan Program Pengembangan Data Informasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini tidak terlepas dari adanya komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif pemerintah dan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

Jakarta, Januari 2026
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH ACEH

SAID MARZUKI, S.IP., M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19870925 200701 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran utama Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh Perantauan di Pulau Jawa, promosi potensi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan Mess Pemerintah Aceh di Jakarta.

Permasalahan utama/ isu strategis yang dihadapi Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur. Permasalahan ini menjadi perhatian utamakarena terkait dengan peran utama Badan Peghubung Pemerintah Aceh sebagai instansi yang mengedepankan pelayanan dalam pelaksanaan tupoksi. Pelayanan merupakan indikator utama Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam pencapaian kinerja instansi. Perbaikan dan peningkatan terhadap kualitas kelembagaan, tatalaksana, sumber daya aparatur serta sarana prasarana pendukung perlu selalu dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

B. Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama, membina masyarakat Aceh Perantauan di Pulau Jawa, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lain;
- b. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan perwakilan negara asing di Jakarta;
- c. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan instansi/lembaga swasta nasional dan lembaga internasional yang mewakili perwakilan di Jakarta;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja Gubernur dan/atau Pejabat Aceh yang sedang bertugas di Jakarta dan sekitarnya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi promosi potensi, sumber daya alam dan seni budaya; dan

- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai struktur organisasi yang disusun untuk mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Hal tersebut diimplementasikan dalam susunan organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang terdiri atas:

a. Kepala Badan

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang meliputi kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan Aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian adalah unsur pembantu Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang undangan;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan aset Pemerintah Aceh di pulau Jawa;
- Pelaksanaan dan pengkordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya, penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja.

c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang hubungan antar lembaga instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat mukim. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, perwakilan negara asing, pihak swasta dan pembinaan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- Pelaksana penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- Pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat.

d. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi

Sub Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Provinsi dan perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan database, protokoler, fasilitasi akomodasi, transportasi, konsumsi kepada unsur pimpinan, pejabat daerah dan tamu Pemerintah Aceh. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai fungsi :

- Pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah;
- Pengelolaan database potensi dan sumber daya daerah provinsi;
- Pelayanan protokoler kepada unsur pimpinan, pejabat Aceh dan tamu pemerintah Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan informasi;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan informasi.

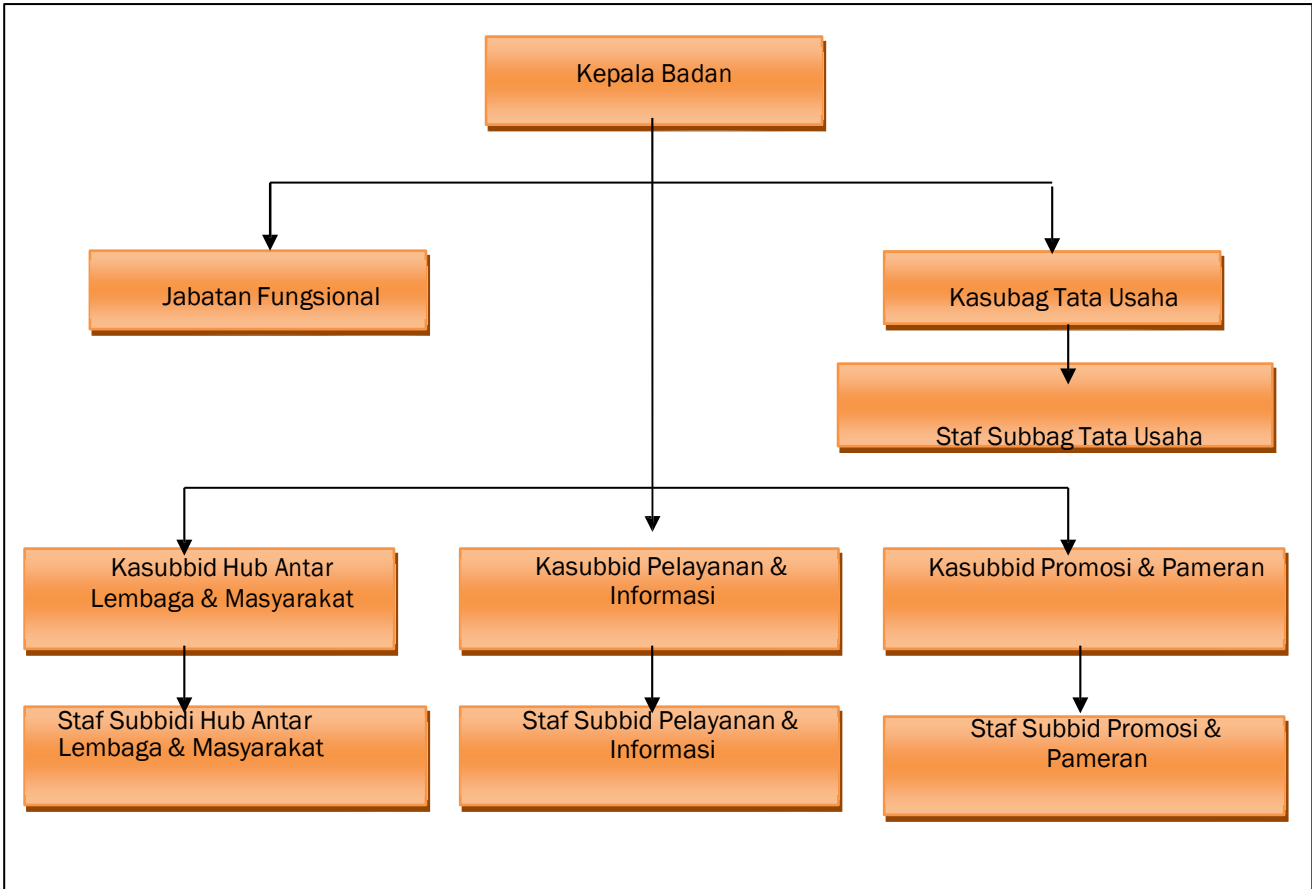
e. Sub Bidang Promosi dan Pameran

Sub Bidang Promosi dan Pameran mempunyai tugas melakukan pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), fasilitasi kegiatan promosi, pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

Sub Bidang Promosi dan Pameran mempunyai fungsi :

- Penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang promosi dan pameran potensi Aceh;
- Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- Pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang promosi dan pameran.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh



D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum Badan Penghubung Pemerintah Aceh dengan penekanan kepada aspek strategis (*strategic issued*) yang sedang di hadapi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang Capaian Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

A. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah dengan Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional.

2. Sasaran

Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

3. Program

Pada tahun 2025 Badan Penghubung Pemerintah Aceh melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

B. Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Indikator Utama merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan

dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang kemudian digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai instansi yang mempunyai fungsi utama dalam Pelayanan dan Promosi Aceh di Jakarta juga menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Badan Penghubung Pemerintah Aceh**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Jumlah Masyarakat yang puas terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh x 100 Jumlah Masyarakat yang dilayani	Menggunakan aplikasi dengan perangkat elektronik	1. Subbidang Pelayanan dan Informasi, 2. Subbidang Hubungan Lembaga dan Masyarakat, 3. Subbidang Promosi dan Pameran

C. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penetapan kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah membuat penetapan kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026. Penetapan kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2 Penetapan Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH			
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	85%

Program	Anggaran
1 Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Rp 3.058.988.764,-

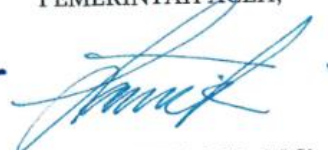
GUBERNUR ACEH,



MUZAKIR MANAF

Banda Aceh, 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH ACEH,



SAID MARZUKI, S.IP., M.Si.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penetapan kinerja menyajikan informasi-informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, target dan program, serta jumlah anggaran yang di rencanakan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh diukur dengan menitikberatkan pada pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2025.

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Pengukuran capaian Penetapan Kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN/ REALISASI (%)
1	2	3	4		5		6
1	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	85	%	85	%	100%

Total keseluruhan capaian Penetapan Kinerja tahun anggaran 2025 rata-rata **100%**.

Target kinerja untuk *Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPPA* tercapai 100%, hal ini didukung oleh keseluruhan pelayanan seperti pemulangan jenazah masyarakat Aceh dan masyarakat yang terlantar di Jabodetabek serta pengelolaan rumah singgah bagi masyarakat yang sedang dalam pengobatan di Jakarta dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 3.2 Perbandingan % Capaian/Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% Capaian/Realisasi		KETERANGAN
			2024	2025	
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	100%	100%	Pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2024 dan 2025 tetap sama

Pada tabel diatas capaian/realisasi terhadap sasaran strategis untuk tahun 2025 dan tahun 2024 tetap sama target yang di tetapkan berhasil dicapai yaitu 100%.

Capaian kinerja untuk sasaran diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tingkat Capaian Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2025
Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS						
Meningkatkan kualitas birokrasi pelayanan publik						
Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Target		Realisasi		%
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	85	%	85	%	100%
Jumlah masyarakat yang dilayani BPPA	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	125	org	54	org	43,2%

Untuk meningkatkan kualitas birokrasi pelayanan publik dengan target indikator kinerja persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA mencapai realisasi 100%. Sasaran strategis ini dilakukan melalui *Program Pelaksanaan Pelayanan Penghubung*, program tersebut adalah *Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat*, kegiatannya berupa pemulangan warga Aceh yang terlantar dan pemulangan jenazah.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025 Badan Penghubung Pemerintah Aceh didukung anggaran sebesar **Rp40.074.779.876,-** yang bersumber dari APBA. Jumlah realisasi penarikan dana **Rp39.529.765.636,-** atau sebesar 98,64%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 jumlah realisasi anggaran tahun 2025 menurun sekitar 0,76% seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2024	29.742.788.695	29.563.448.834	179.339.861	99,40
2	2025	40.074.779.876	39.529.765.636	545.014.240	98,64
	Selisih	10.331.991.181	9.966.316.802		0.76

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran pada tahun 2025 menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,76% dibanding dengan tahun anggaran 2024 disebabkan terlambatnya pengesahaan anggaran perubahan tahun 2025 yaitu pada bulan November 2025 sehingga pelaksanaan dan realisasi kegiatan tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan program dan kegiatan untuk tahun 2025 pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Tabel Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(RP)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		40.074.779.876	39.529.765.636	98,64%	100%
64BELANJA OPERASI		28.120.664.126	27.659.598.606	98,62%	100%
BELANJA MODAL		11.954.115.750	11.861.577.030	99,23%	100%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	36.412.994.732	35.983.104.505	98,82%	100%
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.245.200	24.148.550	99,60%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	24.245.200	24.148.550	99,60%	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.784.163.240	6.687.574.374	98,58%	99,99%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.452.939.240	6.368.420.374	98,69%	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	331.224.000	319.154.000	96,36%	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	199.787.500	99,89%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	199.787.500	99,89%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.372.633.812	6.337.854.979	99,45%	99,88%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	139.237.840	139.119.000	99,91%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	704.424.090	692.959.800	98,37%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	871.809.044	852.944.429	97,84%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.314.975.476	3.314.176.998	99,98%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.203.982	44.172.612	99,93%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	9.100.000	84,26%	100%

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.287.183.380	1.285.382.140	99,86%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.017.397.280	10.941.878.680	99,31%	99,52%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.155.000.000	8.147.700.000	99,91%	100%
	Pengadaan Mebel	340.190.000	339.400.000	99,77%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.522.207.280	2.454.778.680	97,33%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.817.768.440	4.695.829.853	97,47%	99,71%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	428.781.000	428.578.263	99,95%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.978.117.440	1.886.246.454	95,36%	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000	0	0,00%	0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.410.800.000	2.381.005.136	98,76%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.196.786.760	7.096.030.569	98,60%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.668.296.000	3.608.975.074	98,38%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.800.100.000	2.761.113.316	98,61%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	728.390.760	725.942.179	99,66%	100%100%
2	Program Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.661.785.144	3.546.661.131	96,86%	100%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	400.106.880	328.274.601	82,05%	100%
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	0	0	0%	0%
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya	73.245.000	73.200.000	99,94%	100%

	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya	0	0	0%	0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.188.433.264	3.145.186.530	98,64%	100%

Bila dilihat dari tabel laporan realisasi keuangan, berikut penjelasan realisasi kegiatan yang terkait dengan **Perjanjian Kinerja Tahun 2025** yaitu :

Terdiri dari 5 kegiatan yang menunjang capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan masing-masing realisasi keuangan yaitu :

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur Dan Masyarakat dengan realisasi sebesar 82,05%,
- b. Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur Dan Masyarakat dengan realisasi sebesar 0%, hal ini disebabkan karena ketidaktersediaan anggaran.
- c. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Budaya dengan realisasi sebesar 99,94%,
- d. Kegiatan Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Budaya dengan realisasi sebesar 0%, hal ini disebabkan karena ketidaktersediaan anggaran,
- e. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penghubung dengan realisasi sebesar 98,64%.

Kegiatan **point a** ikut menunjang target indikator Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh, kegiatan **point c** menunjang kegiatan promosi dan pameran Seni Budaya Aceh yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jabodetabek, sedangkan **point e** Kegiatan yang menunjang pelayanan pimpinan daerah serta pengakses data dan informasi pada website BPPA.

BAB IV PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan hasil realisasi *Laporan Kinerja* sebesar **100%** dari target Penetapan Kinerja tahun 2025. Program dan Indikator Kinerja yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk realisasi keuangan secara umum menurun dari tahun sebelumnya yaitu **98,64%**. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif Pemerintah dan Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

B. Saran

1. BPPA saat ini masih memerlukan lebih banyak dukungan untuk peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan pelayanan publik yang maksimal demi tercapainya target yang telah ditetapkan dalam RPJM.
2. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah supaya setiap pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

LAMPIRAN I

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN/ REALISASI (%)
1	2	3	4				6
1	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	85	%	85	%	100%

Total keseluruhan capaian Penetapan Kinerja tahun anggaran 2025 rata-rata **100%**

LAMPIRAN II
PENETAPAN KINERJA 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	85%

Program	Anggaran
1 Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Rp 3.058.988.764,-

GUBERNUR ACEH



MUZAKIR MANAF

Banda Aceh, 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH ACEH,



SAID MARZUKI, S.IP., M.Si.